

Memaknai Demokrasi Di Era Reformasi (Pendapat Masyarakat terhadap Demokrasi Saat Ini)

Marcella Palupi Untiasari^{a,1*}, Anita Trisiana^{b,2}, Fathimatuzzahra^{c,3}

^{a,b,c} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang

¹Marcellapalupi06@gmail.com; ³fazahra21@gmail.com

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 5 Januari 2021, direvisi: 17 Januari 2021, disetujui: 19 Desember 2021

Abstrak

Pada era reformasi ini bisa dipastikan bahwa akan terjadi banyak perubahan di masyarakat. Reformasi politik bisa mempengaruhi banyak perubahan di kehidupan social-politik masyarakat yaitu dalam politik pemahaman dan juga implementasi. Penelitian ini dapat bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pemahaman dan demokratis pada saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis hal tersebut dan dalam penelitian ini melibatkan sekitar 10 orang informan di Sragen. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa substansi demokrasi dan implementasinya di masyarakat mengalami perubahan bentuk baru, dimana terdapat adanya banyak konflik nilai-nilai demokrasi yang berpihak konstruktif dan merusak. Demokrasi dilihat secara konstruktif bisa juga ditafsirkan sebagai penyusunan sistem pemerintahan, sosial dan juga politik sistem, kebebasan dalam kebersamaan, penciptaan suasana kesetaraan dan juga keterlibatan orang lain dalam mengambil suatu putusan, menggunakan prosedur, politik yang dapat partisipasi yang luas. Demokratis jika dalam bentuk perilaku yang destruktif intervensi tersebut terhadap Lembaga-lembaga negara, melanggar hak-hak orang lain dan juga dapat tidak toleran terhadap perbedaan.

Kata Kunci : Demokrasi, Reformasi, Politik

Abstract

In this reform era, it is certain that there will be many changes in society. Political reform can affect many changes in the socio-political life of society, namely in the politics of understanding and implementation. This research aims to understand and be democratic in Sragen at this point. This study uses a descriptive approach to analyze this and in this study involved about 10 informants in Sragen. The conclusion obtained from this research is that the substance of democracy and its implementation in society has undergone a new form of change, where there are many conflicts of democratic values that are constructive and destructive. Democracy seen constructively can also be interpreted as the formulation of a system of governance, social and political systems, freedom in togetherness, creation of an atmosphere of equality and also the involvement of others in making decisions, using procedures, politics that can be broad participants. Democratic if in the form of destructive behavior the intervention against state institutions, violates the rights of others and can also be intolerant of differences.

Keywords: *democracy, reform, politic*

Pendahuluan

Dalam dekade terakhir, demokrasi telah menjadi isu inti terkait perubahan sosial dan penyelenggaraan negara Indonesia. Karena perkembangan demokrasi di Indonesia, masyarakat memiliki harapan yang tinggi untuk perbaikan. Namun, menurut sebagian parpol, nilai-nilai demokrasi yang dipahami sebagian besar masyarakat seringkali menunjukkan demokrasi semu, yang sebenarnya sangat berbeda dan demokrasi yang diharapkan.

Haynes (2000) mengemukakan bahwa di sebagian besar negara dunia ketiga, demokrasi menunjukkan aspek yang lebih formal, berfokus pada prosedur dan pengaturan kelembagaan, terutama pemilu; di negara Indonesia sendiri, demokrasi terdapat berbagai kendala, yaitu terkadang terkait semangat demokrasi itu sendiri bertentangan.

Marcus Mietzner mengatakan, demokrasi Indonesia banyak menunjukkan wajah populer masyarakat dihadapan masyarakat. Makna dari demokrasi itu jauh dari ekspresi politik, tetapi juga kinerja pribadi. Publik mengharapkan enam jilid ilmu politik. Pada 4 Oktober 2013, banyak pemimpin yang lebih menekankan demokrasi daripada sistem politik dan kinerja partai. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang demokrasi, penelitian dari beberapa ahli dapat dijadikan referensi.

Penelitian yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 1949 menunjukkan bahwa demokrasi dianggap sebagai demokrasi terbaik disaat ini. Sudut lain, konsep-konsep demokrasi itu dianggap ambigu atau memiliki banyak makna meyakini bahwa demokrasi adalah kesamaan aspirasi dan kepentingan rakyat serta sistem pengambilan keputusan politik. Individu dapat bersaing untuk memenangkan suara rakyat dan

karenanya memiliki hak untuk mengambil keputusan.

Miriam Miriam Budiarjo berpendapat bahwa demokrasi adalah ketika rakyat yang dipilih oleh rakyat menentukan kebijakan publik menurut mayoritas. Huntington menggunakan pemilu untuk mengidentifikasi demokrasi. Minimal, demokrasi itu bisa diartikan sebagai pemilihan umum yang terbuka, bebas dan adil, jelas dalam distribusi kekuasaan, pemeliharaan yang stabil, dan tingkat partisipasi yang luas dan otonom.

Menurut Sahid Gatara, untuk menjaga demokrasi dibutuhkan enam mekanisme. Pertama, pilih seorang pemimpin. Kedua, pemilu yang jujur, adil, bebas dan tertib. Ketiga, kebebasan berpendapat. Keempat, dapatkan informasi secara publik. Kelima adalah otonomi asosiasi warga. Enam hak kewarganegaraan yang inklusif. Beberapa orang ahli membagikan demokrasi menjadi yaitu demokrasi formal / prosedural dan demokrasi substantif. Demokrasi formal bertujuan untuk melembagakan, terutama proses pemilihan umum dan juga partisipasi di dalam pemilu, demokrasi substantif lebih memperhatikan hakikat demokrasi itu sendiri dan mengedepankan nilai-nilai.

Menurut Haynes, kebanyakan negara demokrasi didunia ketiga ialah demokrasi formal. Demokratisasi di Indonesia telah berjalan sesuai dengan prosedur, salah satunya adalah intensifikasi pemilihan langsung atau yang biasa disebut dengan pemilihan umum. Dimulai dengan pemilihan presiden, DPP, DPP, Partai Demokrat, dan tingkat direktorat lokal, semakin banyak masyarakat yang secara langsung menghadapi persoalan pemilihan pemimpin. Pemilu merupakan Indikator demokrasi, terutama di tingkat daerah (peraturan perundang-undangan dan pilkada), banyak yang menilai

pemilu merupakan salah satu indikator demokrasi. Beberapa pemimpin terpilih memang mendapat dukungan mayoritas, sementara pemilu lainnya menimbulkan konflik horizontal dan partisipasi publik yang rendah. Di sisi lain, masyarakat berharap demokrasi dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Karena itu, penting untuk memahami hakikat demokrasi dan implementasinya dalam masyarakat Indonesia. Sebagai suatu landasan model demokrasi yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, memahami masyarakat sangat penting untuk menjelaskan demokrasi. Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menyampaikan suatu pemahaman masyarakat tentang demokrasi, terkhusus di Sragen yang merupakan salah satu wilayah penting dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk analisis deskriptif. Pembelajaran ini melibatkan informan dari berbagai latar belakang, antara lain komunitas, tokoh masyarakat, dan anggota ormas Sragen. Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data yang mentah. Data utama dari wawancara dan survei kuesioner terhadap responden. Penelitian ini juga menggunakan tehnik analisis wacana untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat tentang demokrasi. Gunakan teknik penganalisisan deskriptif untuk analisis kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Sragen pada tahun 2020.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam survei, termasuk responden utama

yang diwawancarai secara mendalam dan diminta menjawab daftar pertanyaan yang tertulis. Penelitian ini melibatkan 10 informan dari tokoh masyarakat (2 orang) dan masyarakat (8). Objek informasi penelitian dipilih secara acak, biasanya terfokus pada komposisi penduduk Sragen. Klasifikasikan penyedia informasi menurut Karakteristik demografis tertentu (yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan dan aktivitas dalam organisasi). Menurut umur, informan dikelompokkan menurut pemahaman politiknya, yakni 18-25 tahun sampai dengan 56 tahun ke atas. Menurut situasi umum Sragen, informan meliputi 11,8% berusia 18-25 tahun, 18% berusia 26-35 tahun, 31% berusia 36-45 tahun, 27,2% berusia 46-55 tahun, 56 tahun ke atas. 12%. Komposisi informan menurut jenis kelamin sedikit berbeda dengan komposisi penduduk Sragen secara keseluruhan, itu adalah 66,5% laki-laki dan 33,5% perempuan. Tetapi, keakuratan hasil penelitian itu tidak akan berkurang. Jenis pekerjaan *whistleblower* bergantung pada komposisi total penduduk Sragen, yaitu bekerja di perusahaan swasta (sebagai seorang karyawan / buruh) dan sektor lainnya (seperti sektor ekonomi informal lainnya). Tingkatan pendidikan informan itu juga menjelaskan situasi secara keseluruhan yakni sebagian besar penduduk berada pada bangku sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama dan sekolah dasar. Kebanyakan informan asalnya dari kelas menengah ke bawah. Dilihat dari komposisi informan terbesar yang berpenghasilan kurang dari 1 juta rupiah, secara umum tingkat penghasilannya paling banyak di bawah Rp. 3 juta. Komposisi ini mencerminkan populasi Sragen saat ini. Penyedia informasi penelitian berasal dari berbagai kalangan dengan

latar belakang organisasi yang berbeda-beda.

Pemahaman Mengenai Demokrasi

Reformasi berupa persamaan, kebebasan berpendapat, atau penyebaran gagasan yang ingin menjadi gagasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, dan memiliki berbagai pengaruh penting terhadap pemahaman sosial dan perubahan kesadaran politik. Adanya perubahan politik di tingkat nasional, khususnya perubahan struktur sistem Politik, prosedur, sistem nilai, dan kebijakan pemerintah memberikan harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Gratis berekspresi menunjukkan bahwa persamaan kebebasan aktivitas politik dan adanya transparansi dan kebebasan informasi memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.

Saat menanyakan informan untuk memberikan pandangan tentang apakah demokrasi adalah sistem politik terbaik di Indonesia, dan ada pandangan yang hampir seimbang antara mereka yang mengungkapkan rasa kurang percaya diri dan mereka yang percaya bahwa demokrasi adalah sistem terbaik di Indonesia.

Indonesia terutama karena mengingat situasi di Indonesia yang masih semrawut, elit politik masih egois, tanpa keterbukaan, transparansi dan SDM belum siap. Mereka yang saat ini kebebasannya lepas kendali dan tidak mengarah pada perbaikan, kondisi ekonomi belum membaik, dan mereka yang tidak mau menerima perubahan, para aktornya tidak Pahami banyak fakta tentang demokrasi, ketidaksepakatan, dan penyalahgunaan kekuasaan masih belum pasti orang-orang.

Sistem pemerintahan atau Kekuasaan mengacu pada pemisahan kekuasaan dan lembaganya, Melalui perwakilannya yang berwibawa di pemerintahan, partisipasi masyarakat menjadi lebih jelas. Kebanyakan orang lain memahami demokrasi dianggap seperti kebebasan, hak untuk berbicara dan hak untuk menghormati perbedaan. pemahaman lain termasuk musyawarah mufakat, pemilihan langsung dan keputusan berbasis keputusan mayoritas.

Menurut keterangan di atas menunjukkan bahwa orang yang memahami demokrasi memiliki nilai-nilai, terutama nilai-nilai kebebasan, hak berbicara dan penghormatan atas perbedaan. Kesamaan posisi hukum dan pemerintahan membuat masyarakat saat ini semakin berani untuk mengambil tindakan. Kebebasan kontroversial adalah kebebasan mengungkapkan pendapat atau keinginan dalam berbagai situasi. Kebebasan dan kesetaraan juga dipahami sebagai peran antara laki-laki dan perempuan dan antara tua dan muda. Di tingkat komunitas lokal adalah bebasnya berekspresi dan berekspresi. Kebanyakan orang mengaitkan perwujudan wujudkan demokrasi di lingkungan dengan membahas proses musyawarah berbagai hal. Demokrasi adalah nilai kebebasan pendudukan satu-satunya standar terbaik dalam wacana politik masyarakat, dan menempati posisi penting di antara mereka. Sebagian besar warga percaya bahwa reformasi berdampak baik pada demokrasi dan implementasinya di tingkat nasional dan lokal, termasuk kebebasan berunding, yang dianggap sebagai Demokrasi adalah nilai utama kebanyakan masyarakat lain. Ketika semua masalah terkait dengan kepentingan umum atau kehidupan masyarakat dibahas bersama dan setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya.

Demokrasi juga diartikan sebagai pemilihan pemimpin berarti banyak orang dapat berpartisipasi melalui pemilihan. Di Indonesia, kami belajar lebih banyak tentang pemilihan kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai demokrasi selama proses pemilihan. Demokrasi atau dapat dianggap sebagai tindakan merupakan sikap yang mengedepankan partisipasi rakyat banyak. Reformasi memberikan inspirasi penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin.

Nilai-Nilai Demokrasi Indonesia: Refleksi Pemikiran Hatta

Demokrasi adalah Sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan orang-orang. Pemerintahan demokratis berasal dari dan dari orang-orang. Rakyat menjadi tema utama dan berperan aktif dalam menentukan masa depan negara Dan negaranya sendiri. Demokrasi Indonesia itu unik dibandingkan dengan sistem demokrasi yang diterapkan di negara bagian Barat, demokrasi di Indonesia ini wajib dilakukan dengan kondisi sosial pantas dan sejarah masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu demokrasi Indonesia menolak ciri-ciri utama individualisme Demokrasi Barat. Individualisme tidak bisa diterima dalam masyarakat Indonesia yang notabene nya multikultural. Demokrasi sendiri bukan hanya dibatasi oleh sistem pemerintah, namun juga dibatasi oleh nilai yang juga harus diterapkan di dalam negara dan kehidupannya. Demokrasi yang sebagai sistem pemerintahan dan nilai-nilai kehidupanpun juga harus berjalan. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan tidak akan jika orang menghayati nilai-nilai mereka dan menjunjung nilai-nilai mereka, mereka dapat bekerja demokrasi itu sendiri. Kita bisa merenungkan Ditulis oleh salah satu tokoh

negara, Mohammad Hatta Pahami bahwa demokrasi adalah nilai kehidupan.

Pada tahun 1960, Mohammad Hatta menulis makalah berjudul "Demokrasi Kita". Hatta mengkhawatirkan demokrasi di Indonesia, karena menurutnya demokrasi Indonesia telah melenceng dari cita-cita luhur bangsa Indonesia ini. Hatta juga mengkritik pada era parlementer itu sebagai suatu era yang dimana para penguasa memegang jabatan malah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan golongan sehingga melupakan rakyat. Hatta pun juga mengkritik keputusan presiden Soekarno, ia mengkritik untuk mengembalikan konstitusi negara ke UUD 1945 dan juga konstituante yang mengawali era Demokrasi Terpimpin sebagai bentuk kediktatoran dihapuskan.

Kemudian Hatta menegaskan kembali demokrasinya ada di Indonesia sesuai dengan pengalaman sosio-historis bangsa ini. Menurut Hatta demokrasi di Indonesia sebagai hasil dari peleburan tiga pengaruh yang menyebabkan bangkitnya demokrasi di Indonesia. Dari ketiga pengaruh itu bersumber dari nilai-nilai asal Indonesia, nilai-nilai Islam yang diajarkan adanya keseragaman, dan nilai-nilai sosialis barat yang juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Demokrasi yang dipraktekan oleh masyarakat merupakan suatu stimulus pertama yang berhasil membentuk nilai demokrasi Indonesia. Masyarakat adat nusantara telah mampu mengembangkan nilai-nilai kolektivis yang dilandasi semangat senantiasa hidup bersama. Meskipun masyarakat telah hidup dalam penindasan feodal di banyak negara selama berabad-abad, mereka juga telah membentuk budaya konsensus dalam proses pengambilan keputusan, namun semangat kolektivisme tetap ada dan hidup dalam

masyarakat. Stimulus kedua bersumber dari nilai-nilai Islam yang juga senantiasa mengutamakan kesetaraan antar sesama. Prinsip persamaan didalam Islam tidak menyetujui keberadaan kasta didalam masyarakat. Hal ini yang menjadikan jaringan Islam diterima luas di nusantara. Prinsip kesetaraan ini juga sejalan dengan masyarakat multikultural Indonesia, sehingga hak-hak etnis minoritas di nusantara dapat terwujud.

Stimulus ketiga itu berasal dari nilai-nilai kemanusiaan yang dapat ditiru dari nilai-nilai sosialisme barat, Nilai kemanusiaan di sini menolak segala jenis penindasan dan eksploitasi oleh sahabat manusia. Nilai tersebut sejalan dengan sejarah Indonesia yang telah dijajah selama berabad-abad. Melaksanakan nilai-nilai universal kehidupan berbangsa dan sekaligus mengabdikan sebagai kepala negara.

Bagi Hatta, demokrasi Indonesia adalah produk gabungan dari pengalaman sosial dan sejarah masyarakat kepulauan. Menurut sifat samudra *omnidirectional*, ia dapat menyerap pengaruh luar. Hatta juga mampu dengan hati-hati menyerap aspek-aspek positif dari masyarakat adat pulau itu, nilai-nilai Islam dan pengaruh sosialisme barat untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Walaupun pernyataan Hatta masih dalam ranah spiritual dan budaya, namun belum terealisasi, namun pemikiran Hatta telah memasuki bidang tertentu yang akan menjadi tanggung jawab kita semua.

Implementasi Demokrasi di Masyarakat

Praktik sosial demokrasi sangat beragam dan dipengaruhi oleh kondisi dan kondisi yang berlaku. Karena pemahaman tentang demokrasi itu beragam, maka banyak perubahan dalam wujud demokrasi di masyarakat. Pertama yaitu mereka semua yang dapat memahami suatu

Penerapan demokrasi, dianggap sebagai perwujudan sikap dan perilaku dalam kehidupan sosial dan politik. selanjutnya, orang-orang yang memahami penerapan demokrasi sebagai aktivitas partisipatif didalam aktivitas politik dan juga sosial. Ketiga yaitu mereka mengerti Ikuti aturan atau dukung pelaksanaan demokrasi kebijakan pemerintah. Ada berbagai pemahaman lain, dan perbedaannya mengarah pada situasi dimana diharapkan bisa juga penilaian terhadap situasi saat ini.

Pada Demokrasi bentuk lokal, bagaimana menjaga penghormatan atas perbedaan dan sikap serta perilaku pihak-pihak lainnya, tingkat partisipan yang juga tinggi di masyarakat, dan kepatuhan terhadap aturanaturan yang sudah ada kesepakatan. Adanya nilai yang baru yang dapat mendukung atau juga penghambat demokrasi juga berinteraksi dengan nilai-nilai lama yang mendukung atau menghambat demokrasi. Melalui berbagai aktivitas internal dalam kehidupan sosial, warga negara mengevaluasi proses demokrasi yang berjalan di lingkungannya. Disisi lain pula, demokrasi itu yang diartikan sebagai suatu kebebasan pula berdampak besar terhadap suatu perubahan. Dalam era demokrasi, kebebasan bisa dijadikan alasan untuk bebas melakukan apa yang diinginkan. Ini terjadi di tempat yang berbeda, menyebabkan perubahan agar tidak lagi mengarah.

Kekuasaan terorganisir adalah bentuk kekuasaan yang berdiri sendiri untuk melindungi hak-hak warga negara. Demokrasi adalah ketika semua orang memiliki pendapat atau ambisinya masing-masing, haknya sama dengan orang lain, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dalam pemilihan pemimpin, mayoritas suara adalah nilai utama demokrasi. Selain makna konstruktif demokrasi tersebut di atas, demokrasi

juga memiliki makna destruktif. Akibat perubahan yang menimbulkan banyak perilaku non-demokrasi, kemerosotan suatu nilai demokrasi tradisional yang belum dianggap sesuai dengan perkembangan zaman telah digantikan oleh nilai modern. Bentuk-bentuk kehancuran demokrasi yang terkait dengan sistem politik negara antara lain campur tangan masyarakat dalam tanggung jawab instansi pemerintah, kerusuhan dalam pemilu, dan kerusuhan terkait prosedur hukum. Semuanya disebabkan oleh kekecewaan terhadap kinerja aparatur pemerintah, namun bersifat konstruktif. Jalan yang lebih rendah.

Karakteristik Demokrasi di Era Reformasi

Pelaksanaan demokrasi di saat era Reformasi ditandai dengan lengsernya kekuasaan Soeharto yang menjabat sebagai Presiden selama 32 tahun lamanya.

Bergantinya pemerintahan BJ Habibie dapat menjadi jalan baru bagi demokrasi di Indonesia, Habibie menguatkan fondasi yang sangat kuat untuk demokrasi selanjutnya pada masa pemerintahan Habibie terjadi beberapa pelaksanaan demokrasi seperti : terciptanya kebebasan dalam pers (pada saat reformasi terjadi ruang kebebasan pers sehingga ruang publik membebaskan semua warga negara untuk berpartisipasi), berlakunya dalam sistem (kenegaraan), berlakunya Habibie memberikan kesempatan rakyatnya untuk berserikat dan berkumpul membahas demokrasi .

Demokrasi yang sudah berlaku di Indonesia pada jaman reformasi yaitu Demokrasi Pancasila ciri khasnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan masa orde baru tetapi sedikit mirip dengan demokrasi parlementer. Kondisi

demokrasi Indonesia dinilai sebagai proses yang menuju suatu kesempurnaan, warga negara yang bertugas mensosialisasikan demokrasi supaya dapat diterapkan di kehidupan. Berikut ini adalah suatu karakteristik demokrasi pada periode reformasi: pemilu lebih demokratis (Pemilu yang akan dilaksanakan jauh lebih demokratis daripada sebelumnya. Sistem pemilu akan terus menerus berkembang memberi jalan bagi rakyat untuk dapat menggunakan hak politik dalam pemilu nanti), rotasi kekuasaan ini berawal dari pemerintah pusat hingga ke daerah Rotasi pemerintahan akan dilaksanakan mulai dari desa ke pusat, pola-pola rekrutmen politik bersifat terbuka (Rekrutmen politik didalam pengisian jabatan dilakukan secara terbuka untuk setiap warga negara yang mampu dan juga memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa harus dikriminasi), hak-hak dasar warga negara pasti terjamin (Sebagian besar hak-hak dasar yang dimiliki oleh rakyat pasti terjamin hak-hak tersebut baik meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers maupun yang lainnya) dan pemilu lebih demokratis.

Aktivitas Kenegaraan pada Sistem Pemerintahan pada Masa Reformasi

Seperti dikutip dari ASEAN yakni bahwa demokrasi reformasi di Indonesia dapat dikatakan lebih maju, tetapi faktor-faktor pendukung untuk kemajuan demokrasi itu ialah keikutsertaan publik menggunakan dukungan dari berbagai macam media. Sementara itu, ancaman suatu demokrasi berasal dari politik dan juga sistem di dalam pemerintahan yang belum transparan utamanya jika dapat dilihat dari KPU pada saat penyelenggaraan suatu pemilu walaupun didalam pelaksanaannya masih mendapati kekurangan, salah satunya apatis yang meningkat didalam masyarakat dan supremasi

hukum yang begitu tajam ke arah bawah namun tumpul ke atas maka dari itu harus dilakukan perbaikan.

Departemen Ilmu Politik Indonesia menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia mendapat 4,9 yang dipakai yaitu: Otonomi, kompetisi, pluralitas, dan juga solidaritas bahwa demokrasi Indonesia dibawah rata-rata. Demokrasi Reformasi memang sudah membawa banyak perubahan bagi kehidupan rakyat Indonesia tetapi sangat disayangkan kemajuan itu belum dapat dirasa oleh masing-masing individu.

Untuk dapat mencapai apa yang telah diharapkan sebelumnya oleh bangsa Indonesia maka diperlukan kerja yang lebih ekstra untuk mencapai demokrasi yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila.

Berikut merupakan tahapan-tahapan demokrasi yang telah diringkaskan secara singkat, padat dan jelas :

Tahap pertama merupakan pergantian kekuasaan dari pemerintah non demokratis kepada pemerintah demokratis. Tahap Kedua membentuk berbagai macam lembaga dan pelaksanaan politik demokrasi yang tertib/teratur dan juga damai. Tahap ketiga yaitu bertujuan untuk menyatukan dan memperkuat sistem pemerintahan sipil dalam menjunjung tinggi demokrasi supaya adil. Tahap Keempat, Implementasi praktik demokrasi yang menjadi bagian dari suatu budaya politik didalam berbangsa dan juga bernegara.

Penyelenggaraan demokrasi reformasi memiliki beberapa ciri-ciri yang khas yang jelas dari sistem pemerintahan sebelumnya . Berikut ini merupakan ciri-ciri demokrasi era reformasi secara singkat:

Menjunjung dengan tinggi musyawarah atau mengambil suatu keputusan bersama berdasarkan suara terbanyak, Mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan individu, tidak memaksakan kehendak, menjunjung sifat kekeluargaan yang sangat tinggi, bertanggung jawab atas keputusan bersama, melaksanakan demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Permasalahan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi dianggap sebagai hal yang penting karena nilai demokrasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Demokrasi digunakan sebagai alat untuk mencapai kebaikan, kebersamaan dalam masyarakat maupun pemerintahan supaya tercipta suasana yang damai.

Kebaikan dari pengertian demokrasi adalah pemerintah dari rakyat dan untuk rakyat baik langsung ataupun perwakilan biasanya peluang terbuka lebar dari berbagai kalangan masyarakat, namun pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia belum sepenuhnya seperti dengan pengertian yang sebenarnya.

Demokrasi yang berlaku di Indonesia belum mampu mewujudkan kesejahteraan yang baik untuk rakyatnya dikarenakan partisipasi masyarakat masih rendah dalam bidang politik. Dari segi teknis demokrasi yang berlaku di Indonesia sebenarnya sudah terlaksana hal ini dapat dilihat dari terlaksananya pemilu sebelumnya.

Menurunnya partisipasi masyarakat untuk bergabung dalam bidang politik sangat berkebalikan dengan dengan angka golput (golongan putih) yang semakin meningkat. Tingkat apatisme masyarakat sangat terlihat di dalam pesta demokrasi.

Hak dalam memilih dan mengemukakan pendapat dapat di golongkan sebagai hak asasi manusia yang sudah terjamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) mungkin masyarakat beranggapan bahwa hak asasi manusia merupakan sesuatu kebebasan karena rakyat boleh menggunakan haknya untuk berpendapat maupun tidak. Memang benar tidak ada hukuman untuk orang yang tidak berpartisipasi politik dalam pemilu namun jika kenaikan presentase golput terus meningkat dapat menimbulkan hal yang berbahaya terhadap demokrasi Indonesia.

Demokrasi Reformasi dalam Naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Sesudah bergantinya masa-masa pemerintahan Soeharto tahun 1998, lalu bangsa Indonesia masuk pada orde reformasi yang berlaku sejak dari 1998 sampai saat ini. Penyelenggaraan demokrasi reformasi dapat dilihat didalam Rencana Pembangunan untuk Jangka Panjang sejak tahun 2005-2025. Berikut adalah penjelesaian yang lengkap yang bisa digunakan sebagai panduan :

Pertama, pelaksanaan pemilihan umum secara langsung rakyat memiliki hak untuk mengeluarkan keputusan dan bebas memilih presiden, wakil presiden dan juga anggota dewan misalnya seperti DPRD, DPR, PDP, dan kepala daerah lainnya berdasar suara terbanyak (*voting*).

Kedua, telah selesainya masa perubahan dalam demokrasi yang bisa dilihat dari perkembangan yang sangat pesat dengan di capainya sistem demokrasi Indonesia dari tahun 1998. Dimana pada saat itu demokrasi mengalami suatu kemajuan daripada sebelumnya.

Ketiga, berhasilnya penyelenggaraann asas desentralisasi maka hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom dapat berjalan lebih baik dan lancar. Keempat hubungan masyarakat dengan anggota militer dapat terbentuk dengan baik, selain itu masing-masing pihak dapat menghargai peranan masing-masing tanpa adanya permasalahan.

Dan yang terakhir kesadaran masyarakat mulai meningkat hal ini dapat dilihat dari mulai banyaknya aktivitas publik yang semakin aktif dalam mengemukakan pendapat dan kesediaan rakyat untuk berpartisipasi. Sehingga pengetahuan dan wawasan rakyat tentang dunia politik lebih berkembang jauh daripada sebelumnya hal ini merupakan hasil buah dari harapan yang diinginkan pemerintah dalam membina rakyatnya untuk bersuara dalam demokrasi. Situasi seperti sekarang ini di harapkan tetap berlangsung dan membuat publik menjadi lebih *open mind*.

Perbandingan pelaksanaan demokrasi pancasila pada masa orde baru dan masa reformasi

Pada pelaksanaa demokrasi Pancasila di masa orde baru terdapat beberapa hal yang dapat dibandingkan dengan masa reformasi yaitu pelaksanaan pemilu di masa orde baru itu tidak dilakukan secara demokratis dan juga banyak terjadi kecurangan serta dibatasinya partai politik pada masa itu yaitu hanya 3 partai politik saja. Banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemustan kekuasaan berapa di tangan presiden. Dalam dunia Pendidikan berkembang karena banyak mengukir prestasi di berbagai program.

Sedangkan demokrasi pada masa reformasi yaitu pemerintah pada masa ini tidak memiliki banyak kebijakan di dalam sistem pemerintahanya sehingga hanya mengikuti partai

yang saat itu berjalan. Fasilitas Pendidikan terbuka untuk segala kalangan dan tidak ada Batasan di dalam menempuh Pendidikan. Melaksanakan pemilu di awal munculnya berbagai partai politik dengan adanya perbedaan latar belakang yang dapat dilihat dari segala segi golongan maupun ideology.

Ketentuan sistem pemerintahan indonesia pada masa reformasi

Sistem pemerintahan pada masa reformasi dapat dilihat juga dari adanya aktivitas kenegaraan yaitu dengan melihat kebijakan pemerintah yang memberikan ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk dapat mengeluarkan pendapatnya dan pikirannya baik itu melalui tulisan atau lisan dan juga upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan juga bersih serta dapat bertanggung jawab dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya ketetapan MPR No. IX / MPR/ 1998. MPR berani mengambil Langkah-langkah politis di sidang tahunan dengan menuntut adanya suatu laporan pertanggung jawaban tugas dari Lembaga negara, UUD 1945 diamandemen, pimpinan dari MPR dan DPR dipisahkan jabatannya, dan juga berani dalam memecat presiden di dalam sidang istimewa. Demokrasi reformasi berakibat mangalami adanya perbedaan yang sangat terlihat walau dalam ketentuan demokrasi yang dipakai itu demokrasi Pancasila tetapi itu sangat terlihat dan juga didominasi sistem liberal.

Revolusi Demokrasi

Sekalipun perkembangan demokrasi di inonesia banyak mengalami kekurangan dan juga kelebihan dalam pelaksanaannya namun hal-hal tersebut jangan menjadi suatu alasan untuk kita semua untuk tidak berusaha dan menerapkan

demokrasi di Indonesia dalam bentuk yang nyata. Kapitalisme Global memunculkan suatu kesenjangan baik dalam ekonomi dan politik mapun juga kekuasaan beberapa elit terhadap para masyarakat. Dan hal itu harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada saat ini. Pada dasarnya demokrasi di Indonesia sebenarnya juga menentang keras hal itu. Demokrasi di Indonesia menjadikan kegiatan ideal antara demokrasi ekonomi dan juga demokrasi politik. Soekarno menyebutnya dengan bahasa sosio-demokrasi. Sosio demokrasi adalah demokrasi yang menkankan pemerataan dalam bidang ekonomi dan juga bidang politik. Begitu pula yang beda antara demokrasi Indonesia dengan demokrasi barat yang pada dasarnya mereka meengedepankan kebebasan individu diatas segalanya. Kebebasan suatu individu yang mutlak ini yang menajdi titik mula kemunculan suatu penindasan juga ketidak adanya kesetaraan di dalam masyarakat.

Sosio demokrasi harus di terapkan pada penduduk di Indonesia. Pada saat saat ini rakyat mempunyai hak mutlak untuk memilih dan juga dipilih dalam sautu pemilu dan juga pemilu yang dilaksanakan saat ini cenderung berjalan lebih demokratis daripada pada era sebelumnya. Namun hal itu tentu belumlah cukup. Karena rakyat tidak hanya diberikan kebebasan dalam politik namun juga harus diberikan kebebasan dalam ekonomi.

Sosio-demokrasi ini bisa terwujud apabila ada suatu keiukutsertaan yang aktif dari banyak dan seluruh rakyat Indonesia. Bagaimanapun demokrasi adalah hal yang bertujuan untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan juga makmur. Rakyat perlu aktif didalam politik-ekonomi tanpa ada suatu kemacetan di dalamnya. Nilai kolektif kesetaraan dan juga kemanusiaan yang diuraikan oleh Hatta itu sebagai suatu hal yang ideal mentalkulttural demokrasi yang perlu

direnungi dan juga dilaksanakan secara penuh di dalam suatu proses ini. Jika disingkat dalam mewujudkan sosio-demokrasi itu sama juga halnya dengan melaksanakan revolusi demokrasi.

Ada beberapa langkah dalam mewujudkan revolusi demokrasi, pertama dengan menjadikan kaum intelektual sebagai biro dari adanya suatu perubahan. Kaum intelektual sendiri harus berperan dan ikut aktif di dalam ranah politik maupun kultural dalam memajukan bangsa ini. Hal ini juga sudah dapat dibuktikan di dalam suatu sejarah bangsa Indonesia pada saat para pribumi yang terpelajar menjadi sosok pelopor dari kebangkitan nasional. Jika disingkat kaum intelektual mempunyai suatu tanggungjawab sejarah untuk dapat memperbaiki kondisi suatu negara yang sedang kurang baik. Saat ini kaum intelektual juga harus bisa merubah suatu susunan struktur social yang terselubung yang dapat menindas hak-hak politik dan ekonomi rakyat. Sehingga diharapkan kaum intelektual harus dapat menunjukkan peran mereka sebagai biro suatu perubahan untuk mengakomodir suatu kepentingan masyarakat yang banyak.

Langkah yang kedua yaitu dengan mendorong bangsa agar dapat menciptakan regulasi yang dapat melindungi suatu hal-hak ekonomi di masyarakat.

Langkah terakhir yaitu menjadikan rakyat sebagai subjek dari demokrasi penuh. Itu bisa dilaksanakan dengan keterlibatan rakyat dalam mengambil suatu keputusan-keputusan strategis dalam negara. Keterlibatan rakyat dalam mengambil suatu keputusan ini karena pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil sesuai dan dapat dukungan dari masyarakat dengan demikian masyarakat juga benar-benar berperan aktif dan mendukung dalam suatu proses-proses penyelenggaraan negara karena segala keputusan dan kebijakan

yang diambil oleh pemerintah juga harus mendapat persetujuan dari rakyat. dan juga kedaulatan rakyat pun dapat terwujud pula melalui langkah-langkah ini.

Revolusi demokrasi adalah jalan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki suatu demokrasi Indonesia. Penduduk Indonesia merasa lelah dan juga mereka kecewa melihat saat ini di dalam kenyataannya pelaksanaan demokrasi yang didominasi oleh kaum-kaum elite sehingga rakyat saat ini membutuhkan perubahan. Melakukan revolusi demokrasi pun tidak mudah. Kita harus kembali mempelajari dan menggali nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Nilai tersebut harus direnungi dan juga dilakukan untuk dapat mewujudkan sosio-demokrasi. Revolusi bisa dimulai dari kapan saja dan pada aktor utamanya adalah rakyat-rakyat yang punya suatu kesadaran dan juga berani untuk dapat mengubah demokrasi Indonesia yang sedang morat-marit.

Pelaksanaan Demokrasi pada Era Reformasi

Sebelum lengsernya presiden Soeharto sebagai presiden kondisi pemerintahan kurang begitu mengenakan bagi rakyat karena pada saat itu rakyat tidak diperbolehkan menyuarakan pendapatnya. Masa orde baru sering menonjolkan sifat aktivis yang senang mengkritik pemerintah dan membubarkan media yang bersifat kritis, pada saat ini juga masih terdapat ancaman contoh ancaman yang masih muncul yaitu ancaman pemecatan pegawai negeri sipil yang tidak mau memilih Golkar.

Setelah berlangsungnya masa reformasi, kebebasan rakyat dalam memilih dan menyuarakan pendapat kembali lagi dimana rakyat dapat mengkritik pemerintah tanpa ada ancaman apapun dari partai.

Kekuasaan rakyat pada saat reformasi juga lebih meningkat, sejak tahun 2004 presiden di pilih langsung oleh rakyat karena rakyat bisa langsung dalam memilih pemimpinnya maka rakyat akan lebih memiliki suara yang kuat dan dalam peran di pemerintahan dan dalam pemilihan prseiden tidak hanya diputuskan oleh MPR,dan anggota politik lainnya.

Dan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi pada saat demokrasi dapat meningkatkan peran semua lembaga-lembaga , menengaskan fungsi dan wewenang pemerintah serta pembagian kekuasaan lebih merata.

Refleksi Dua Dekade Demokrasi Indonesia Era Reformasi

Dalam rangka membangun kultur demokratis, yaitu watak yang mengapresiasi perbedaan atau juga lebih pada mengedepankan prinsip yang inklusivitas, seolah-olah malah semakin menguap.

Disini perbedaan seringkali masih menjadi suatu pemicu, bahkan juga dijadikan pemicu agar terjadinya gesekan sosial bahkan juga konflik. Berbagai gesekan atau konflik dalam sebuah pilkada dan pemilu serentak, terjadinya bebrapa kekerasan komunal di sejumlah wilayah, dan maraknya *hoax* di media sosial dapat menjadi sebuah cermin sejauh mana keberhasilan suatu demokrasi di Indonesia.

Di dalam kondisi ini tentu akan menjadi hal yang memprihatikan karena pada kelas menengah justru malah diharapkan bukanya hanya mampu menjadi agen pendorong kultur demokrasi tetapi juga bagi Sebagian kalangan juga diharapkan mampu dan dan menjadi penggerak demokrasi sosial. Sebenarnya pada keberhasilan suatu demokrasi ini mengacu pada sejauh mana kebijakan dan praktik politik yang ada dapat menciptakan keadilan dan

kemakmuran bagi semua atau sebanyak mungkin orang Indonesia.

Profesor Valina menjelaskan, UUD 1945 memiliki beberapa kelemahan yang mendasar sehingga menjadikan sumber lahirnya pemerintah yang otoriter pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, seperti *executive heavy, checks and balances* lemah serta juga perlindungan dalam HAM yang terbatas. Oleh karena itu maka diperlukan pengaturan-pengaturan ulang distribusi kekuasaan di dalam cabang-cabang kekuasaan *trias politika* menggunakan pendekatan *separation of powers*.

Hasil dari amandemen UUD 1945 yaitu MPR tidak lagi menjaga Lembaga tertinggi negara dan menjadikan semua Lembaga negara setara kedudukanya, pada kedudukan eksekutif (presiden) kuat terhadap Lembaga legislative (DPR) dan juga kedudukan legislative pun juga kuat terhadap lembaga eksekutif tidak boleh saling menjatuhkan. Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan bisa dipilih langsung oleh rakyat dan juga dapat diberhentikan melalui mekanisme *impeachment*, mempertegas mekanisme *checks and balances* antara Lembaga-lembaga negara termasuk pada kekuasaan membentuk UU di DPR namun pada pihak lain presiden juga dapat mengajukan RUU dan setiap RUU dibahas Bersama Presiden dan DPR.

Dengan adanya distribusi kekuasaan yang seperti demikian diharapkan mampu mempertegas karakteristik sistem pemerintah presidensial. Pada pemilihan presidensialisme bertujuan untuk rnenghadirkan stabilitas dalam pemerintahan dalam konteks masyarakat yang semakin terbuka dan dalam situasi dunia yang semakin global dan juga kompetitif. Pilihan ini pun merupakan cita-cita dari pendiri negara yaitu

mengenai perlunya menghadirkan pemerintahan yang kuat pasca Indonesia merdeka.

Pada sistem demokrasi perwakilan dalam sistem pemerintahan presidensial juga memerlukan kehadiran sistem pemilu yang dirasa kompatibel, wakil rakyat yang dapat jujur dan amanah, pers yang dapat independen dan juga masyarakat sipil yang kuat pula. Sistem pemilu dapat memberi dampak positif apabila rakyat dapat memahami hak dan juga kewajiban sebagai warga negara.

Rekomendasi yang dihasilkan dari riset ini adalah mengevaluasi penyelenggaraan pilkada secara langsung agar pilkada bisa menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan juga berkualitas sehingga dapat mempercepat kemakmuran suatu daerah dan juga kemakmuran Indonesia. Dan juga dapat memperkuat fungsi legislasi DPD di dalam rangka *checks and balances* intra parlemen, memperkuat otonomi daerah-daerah. Membangun budaya politik demokrasi, begitu juga nilai-nilai demokrasi harus menjadi dasar dan juga sikap dan perilaku elite dan juga masyarakat luas.

Kesimpulan

Hakikat demokrasi dan implementasinya dalam masyarakat saat ini sedang berubah, yaitu mencari bentuk baru yang dapat dilengkapi oleh konflik suatu nilai demokrasi yang juga konstruktif dan juga destruktif secara konstruktif pula. Demokrasi diartikan sebagai tatanan kelembagaan dalam pemerintahan, masyarakat dan sistem politik yang menciptakan suasana kesetaraan, persatuan, dan kebebasan berpartisipasi. Ketika orang membuat keputusan, mereka juga menggunakan prosedur yang memungkinkan banyak peserta untuk berpartisipasi. Lain dari itu, dalam masyarakat

juga terjadi konflik diantara nilai pribadi dan nilai komunis didalam masyarakat jadi dapat peka terhadap permasalahan horizontal.

Pertumbuhan dalam demokrasi bisa ditandai dengan merosotnya negara dan juga statusnya di depan umum. Nilai pada demokrasi tradisional yang mulai merosot, seperti juga permusyawaratan, perlakuan yang dibedakan, pelembagaan kehidupan masyarakat, dan persatuan masih dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman, nilai-nilai modern tersebut tergantikan oleh perilaku non-demokrasi yang disebabkan oleh perubahan dan digantikan oleh nilai-nilai modern saat ini.

Banyak orang dapat paham suatu demokrasi itu sebuah nilai, utamanya mengenai suatu kebebasan, hak untuk berbicara, dan juga penghormatan terhadap perbedaan. Kedudukan hukum dan pemerintahan yang sama membuat masyarakat saat ini semakin berani untuk bertindak.

Perubahan politik di tingkat nasional dapat membawa harapan baru untuk Indonesia yang lebih baik. Keberlangsungan demokrasi di dalam masyarakat ada berbagai macam dan dapat terpengaruh akan keadaan dan kondisi disaat itu. Keadaan demokrasi Indonesia dipandang sebagai suatu proses Warga negara yang mengejar kesempurnaan, memikul tugas memasyarakatkan demokrasi agar bisa diterapkan dalam kehidupan.

Referensi

Yunus, Nur Rohim, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" dalam *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, Vol. 2 Nomor 2, (2015).

Arif Sofyan (2013). Pemaknaan
Demokrasi di Era Reformasi. Jurnal
Ilmiah Pendidikan, POLITIKA,
Vol. 4, No. 2

Miftahul Habib Fachrurozi, S. Pd. (2015).

Revolusi Demokrasi: Suatu
Gagasan Memperbaiki
Demokrasi Indonesia. Jurnal
Ilmiah Pendidikan

Zulfikri Suleman, Demokrasi Untuk Indonesia:
Pemikiran Politik
Bung Hatta, (Jakarta: Kompas,
2010), hlm. 182

Soekarno, "Demokrasi Politik dan Demokrasi
Ekonomi", dalam
Dibawah Bendera Revolusi Jilid I,
(Jakarta, 1965), hlm. 175.

Edward Said, Peran Intelektual, (Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor, 2014), hlm. 8.

William Liddle, Memperbaiki Mutu
Demokrasi di Indonesia: Sebuah
Perdebatan, (Jakarta: PUSAD
Paramadina, 2012), hlm. 4.

Prof. Valinka Singka Subekti (2020).
Refleksi Dua Dekade Demokrasi
Indonesia Era Reformasi. Makalah
disajikan dalam rangka Dies Natalis
FISIP UI ke-52, 13 Feb 2020. Jakarta

Vira Mahdiya (2020). Demokrasi
Reformasi (<https://cerdika.com/demokrasi-reformasi/>, diakses 27 November 2020)

Diahvioli, Demokrasi Era Reformasi

(<https://brainly.co.id/tugas/13350545>)

Arum Sutrisni Putri, Kompas. 13 Februari 2020.
Karakteristik Demokrasi Periode
Reformasi (1998-sekarang)
(<https://amp.kompas.com/skola/read/2020/02/13/160000569/karakteristikdemokrasi-periode-reformasi-1998sekarang->)

Anik Prihatini, Kompasiana. 24
Juni 2015. Permasalahan Demokrasi di
Indonesia
(https://www.kompasiana.com/amp/anik-prihatini/permasalahandemokrasi-di-indonesia_5529d4126ea834e03d552d0c)

Laellatulhasanah, Bandingkan
pelaksanaan demokrasi Pancasila
pada masa orde baru dan masa
reformasi
(<https://brainly.co.id/tugas/36144541>
)

M. Makhfudz. (2018). Demokrasi di Era
Reformasi. Jurnal Ilmiah Pendidikan,
(Online), Volume 2
Nomor 8b
(http://103.229.202.71/index.php/ada_lah/article/viewFile/8725/4696 ,
diakses 27 November 2020)

Yunus, Nur Rohim, "Aktualisasi
*Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara*" dalam
*SOSIO DIDAKTIKA : Social Science
Education Journal*, Vol. 2 Nomor 2,
(2015)

biarkan halaman ini tetap ada